

REKOGNISI DAN KENDALA YANG DIHADAPI PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG DALAM IMPLEMENTASI MBKM

Abdul Halim

Program Studi S1 Teknik Sipil, Universitas Widyagama Malang, Kota Malang

*Email Korespondensi: halim@widyagama.ac.id

ABSTRAK

Untuk mengantisipasi perkembangan zaman yang terjadi begitu cepat, Kemendikbud menawarkan sebuah konsep MBKM. Konsep ini menyuarakan adanya kemerdekaan dalam belajar dengan maksud mempersiapkan mahasiswa lulusan perguruan tinggi, baik negeri atau swasta. Semua perguruan tinggi harus memfasilitasi hak mahasiswa untuk dapat mengikuti program MBKM dalam 8 bentuk kegiatan pembelajaran, tidak terkecuali Program Studi Teknik Sipil Universitas Widyagama Malang. Untuk menjalankan program MBKM prodi Teknik Sipil telah berhasil membuat buku pedoman pelaksanaan MBKM dan kurikulum MBKM termasuk rekognisinya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara rekognisi dan kendala dalam pelaksanaan implementasi MBKM oleh Prodi Teknik Sipil Universitas Widyagama, dengan metode kajian pustaka terhadap pedoman MBKM dan kurikulum MBKM prodi Teknik Sipil serta simulasi rekognisi untuk kegiatan 7 BKP MBKM selama 2 semester. Hasil penelaahan pedoman kurikulum Prodi Teknik Sipil, rekognisi yang digunakan memakai bentuk terstruktur untuk BKP pertukaran pelajar baik di dalam Universitas Widyagama maupun di luar dengan pengakuan sesuai SKS mata kuliah yang diprogramkan. Untuk kegiatan 7 bentuk kegiatan pembelajaran selain pertukaran pelajar rekognisi yang digunakan adalah bentuk bebas yang dinyatakan dalam kegiatan hard skill dan soft skill. Kendala dalam pelaksanaan rekognisi apabila mahasiswa mengambil 7 bentuk kegiatan pembelajaran selain pertukaran pelajar, sebanyak 2 semester hanya bisa disetarakan 8 – 12 SKS.

Kata kunci: Rekognisi, MBKM

ABSTRACT

Developments and changes in the current era are happening so fast, to anticipate it, the Government, through the Ministry of Education and Culture, offers an Independent Learning Campus Merdeka program. This concept is stating that there is independence in learning to prepare students graduating from public and private universities to be able to face the developments and changes of the times that are so rapid. All students have the right to participate in the MBKM program and universities are obliged to facilitate it. The MBKM program consists of 8 Forms of Learning Activities, and the Civil Engineering Study Program at the University of Widyagama Malang has succeeded in making a guidebook for implementing the MBKM curriculum and its recognition for the implementation of this government program. This article was created to find out how to recognize and recognize obstacles in the implementation of MBKM by the Civil Engineering Study Program at Widyagama University by using the literature review method, namely a literature review of the guidelines and curriculum of the MBKM Civil Engineering Study Program and a recognition simulation for the 7 BKP MBKM activities in addition to student exchanges for 2 semesters. After reviewing the curriculum guidelines for the Civil Engineering Study Program, the result is that the student exchange BKP inside and outside Widyagama University uses structured form recognition, as well as credits that are recognized in accordance with the credits of programmed courses. As for the 7 BKPs, apart from student exchange, they use free form recognition which is realized in hard skill and soft skill activities. The obstacle found in the implementation of this MBKM is that if students take 7 BKP in addition to student exchange in the second semester, it can only be equaled 8 - 12 credits.

Keywords: Recognition, MBKM

PENDAHULUAN

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan melalui Permendikbud No 3 tahun 2020, mengandung arti kemandirian dan kemerdekaan bagi lembaga pendidikan baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti Bentuk Kegiatan Pembelajaran dari implementasi program merdeka belajar kampus merdeka. Hak mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan belajar di luar prodi selama 3 semester, memberi kesempatan untuk mendapatkan kompetensi tambahan di luar Capaian Pembelajaran yang ditetapkan Prodi sebagai bekal untuk masuk di dunia kerja setelah lulus sarjana. Di samping itu, pengalaman yang diperoleh akan memperkuat kesiapan lulusan dalam beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja, kehidupan di masyarakat dan menumbuhkan kebiasaan belajar sepanjang hayat. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan [1]-[5]: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Mengacu ketentuan pada pasal 18 Permendikbud No. 3 Tahun 2020, maka mahasiswa mempunyai kesempatan untuk dapat mengikuti implementasi MBKM menempuh pembelajaran di luar prodi pada Perguruan Tinggi yang sama dengan mata kuliah terbatas yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi sebanyak 1 (satu) semester setara maksimal 20 (dua puluh) sks. Selanjutnya mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk kuliah 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks untuk mengikuti pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Dengan adanya kesempatan mengikuti program MBKM sebanyak 3 (tiga) semester, maka tersisa 5 (lima) semester untuk mengikuti pembelajaran pada prodi yang setara dengan 84 (delapan puluh empat) sks apabila total sks dari kurikulum prodi tersebut adalah sebanyak 144 sks.

Guna mencapai tujuan MBKM dibuat program kegiatan yang tertuang pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1 dinyatakan dengan nama Bentuk Kegiatan Pembelajaran sebanyak delapan bentuk program yang meliputi: 1) pertukaran pelajar, 2) magang/praktik kerja, 3) mengajar di instansi pendidikan, 4) proyek di desa, 5) penelitian/riset, 6) kegiatan kewirausahaan, 7) studi/proyek independent dan 8) proyek kemanusiaan. Untuk memenuhi kewajiban memfasilitasi mahasiswa dalam implementasi MBKM, maka semua perguruan tinggi harus menyiapkan pedoman kerjasama kurikulum dan implementasi merdeka belajar kampus merdeka termasuk prosedur operasional baku dan manual mutu. Adanya penyetaraan implementasi MBKM sebanyak 60 SKS maka perguruan tinggi harus meninjau dan mengembangkan kurikulumnya untuk memfasilitasi pelaksanaan MBKM terutama dalam hal rekognisi mata kuliah [6]-[10].

Untuk memenuhi kewajiban memfasilitasi implementasi MBKM bagi mahasiswa bukanlah hal yang mudah bagi perguruan tinggi, banyak hal yang harus dilaksanakan

sebagai konsekuensinya seperti peningkatan SDM dosen dan tenaga pendidikan, penambahan atau penyesuaian unit kerja yang dapat menangani MBKM, penyesuaian sistem akademik dan pasti adanya peningkatan pada anggaran biaya belanja perguruan tinggi, yang semuanya ini dapat menjadi kendala bagi perguruan tinggi terutama perguruan tinggi swasta. Banyak artikel telah mengkaji dan membahas tentang implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) antara lain; Nurhayani, 2020 membahas tentang konsep kampus merdeka belajar di era revolusi 4.0, dan berikutnya Muslikh (2020) menulis tentang landasan filosofis dan analisis terhadap kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka. Sedangkan Hendrik (2020) meneliti tentang implementasi kebijakan merdeka belajar dalam proses pembelajaran di kampus IAKN Kupang-NTT dan Nora Susilawati (2021) menjelaskan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam pandangan filsafat pendidikan humanisme. Tuti Marjan Fuadi dan Dian Aswita (2021) yang mengkaji Penerapan Dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh dalam mengimplementasikan MBKM. Dari sekian penelitian dan artikel tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) belum ada yang membahas tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); bagaimana penerapannya serta kendala apa saja yang dihadapi oleh perguruan tinggi swasta terutama dalam penyesuaian dan pengembangan kurikulumnya.

Artikel ini mengkaji bagaimana pelaksanaan rekognisi dan kendalanya pada pelaksanaan merdeka belajar dan kampus merdeka di program studi teknik sipil fakultas teknik universitas widyagama.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode library research. Menggunakan analisis data berdasarkan bahan tertulis berupa catatan yang terpublikasikan, buku, majalah, surat kabar, naskah, jurnal maupun pencermatan terhadap literatur online. Kajian dalam artikel ini difokuskan membahas tema "Bagaimana Rekognisi dan kendala yang dihadapi oleh Prodi Teknik Sipil Universitas Widyagama Malang dalam Implementasi MBKM". Sumber utama dalam studi ini adalah Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Widyagama Malang. Sedangkan sumber sekunder adalah kebijakan program "Merdeka Belajar" yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang didapatkan pada saat pelaksanaan hibah KSKI MBKM 2021 dan artikel jurnal nasional maupun internasional, undang-undang negara, dan sumber internet lainnya. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan menggali permasalahan yang dihadapi oleh program studi Teknik Sipil Universitas Widyagama dalam pelaksanaan MBKM dan melakukan simulasi rekognisi akan implementasi MBKM selama 1 (satu) semester, 2 (dua) semester dan 3 (tiga) semester.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prodi Teknik Sipil Universitas Widyagama pada tahun 2021 melakukan peninjauan dan pengembangan kurikulum untuk dapat melaksanakan MBKM dihasilkanlah kurikulum MBKM dengan distribusi mata kuliah inti dan lokal, kelompok mata kuliah tingkat Universitas, tingkat fakultas dan mata kuliah prodi sebagai berikut:

Dari 43 SKS mata kuliah wajib lokal terdapat 6 SKS mata kuliah Agama, Bahasa Indonesia dan Pancasila/Pendidikan Kewarganegaraan yang wajib diberikan kepada mahasiswa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Paragraf 2, maka mata kuliah wajib dan pilihan yang merupakan mata kuliah lokal yang dimungkinkan digunakan untuk rekognisi BKP MBKM ada sebanyak 47 SKS.

Tabel 1. Distribusi Jumlah SKS pada Kelompok Mata Kuliah Inti dan Lokal

Semester	UNIVERSITAS		FAKULTAS		PRODI			JUMLAH SKS /SEMESTER
	INTI	LOKAL	INTI	LOKAL	INTI	WAJIB LOKAL	PILIHAN LOKAL	
I	-	6	4	3	5	-	-	18
II	-	4	4	2	7	4	-	21
III	-	2	2	-	14	3	-	21
IV	-	2	-	-	14	5	-	21
V	2	-	-	-	15	-	-	17
VI	-	-	3	-	11	4	4	22
VII	-	-	-	-	3	4	4	11
VIII	-	-	-	-	-	-	2	2
Paralel		4	12		-	-	-	16
JUMLAH SKS	2	18	25	5	69	20	10	149
JUMLAH SKS MATA KULIAH INTI								96
JUMLAH SKS MATA KULIAH WAJIB LOKAL								43
JUMLAH SKS MATA KULIAH PILIHAN LOKAL								10

Mengacu pada Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dirjen DIKTI Tahun 2020, penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (free form) dan bentuk terstruktur (structured form), atau dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas dan terstruktur. Bentuk bebas (free form) Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (hard skills), maupun kompetensi halus (soft skills) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Bentuk berstruktur (structured form) adalah pengakuan SKS dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan BKP yang dipilih.

Untuk kegiatan 1 semester di dalam Universitas Widyagama yaitu perkuliahan di luar prodi Teknik sipil, tidak mengalami kesulitan untuk melakukan rekognisi termasuk pertukaran pelajar pada prodi Teknik sipil di luar Universitas Widyagama. Tabel 2 merupakan contoh rekognisi pada perkuliahan di luar prodi Teknik sipil di dalam Universitas Widyagama.

Tabel 2. Penyetaraan Perkuliahan Mahasiswa Prodi Teknik Sipil di Prodi Teknik Industri, Prodi Ilmu Hukum dan Prodi Manajemen Universitas Widyagama

Mata Kuliah Prodi Teknik Sipil				Mata Kuliah Prodi Teknik Industri			
Kode	Mata Kuliah	SKS	Smtr	Kode	Mata Kuliah	SKS	Smtr
TSP102	Statika I (+T)	3	1	FTI306	Mekanika Teknik	3	3
TSP643	Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja Konstruksi	2	6	FTI804	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2	8
TSP522	Ekonomi Teknik	2	7	FTI307	Ekonomi Teknik	2	3
Mata Kuliah Prodi Teknik Sipil				Mata Kuliah Prodi Manajemen			
Kode	Mata Kuliah	SKS	Smtr	Kode	Mata Kuliah	SKS	Smtr
TSP746	Manajemen Waktu dan Biaya Proyek	2	VI	MAN408	Manajemen Strategik	3	IV
TSP748	Manajemen SDM dalam Proyek	2	VI	MAN409	Akuntansi Manajemen	3	IV
				MSM621	Perencanaan Sumber Daya Manusia	3	VI
Mata Kuliah Prodi Teknik Sipil				Mata Kuliah Prodi Teknik Hukum			
Kode	Mata Kuliah	SKS	Smtr	Kode	Mata Kuliah	SKS	Smtr
TSP747	Etika Profesi & Aspek Hukum Konstruksi	2	7	PLP508	Hukum Jasa Konstruksi dan Tanggungjawab Korporasi.	2	5
				FHK734	Etika dan Tanggungjawab Profesi	2	7

Rekognisi untuk 2 (dua) semester di luar Universitas Widyagama, prodi Teknik Sipil mengkonversikan 7 BKP (selain Pertukaran Pelajar) ke mata kuliah pilihan, kapita selekta dan mata kuliah yang bersesuaian dengan BKP yang diprogramkan. Karena mata kuliah pilihan dan kapita selekta letaknya ada pada semester gasal dan genap, maka agak sulit untuk melakukan rekognisi dengan memakai bentuk terstruktur sehingga dipilih rekognisi bentuk bebas. Mahasiswa yang memprogramkan MBKM dibebaskan dari memprogramkan mata kuliah pilihan, kapita selekta dan mata kuliah yang bersesuaian dengan BKP yang diambil, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Rekognisi untuk 8 BKP MBKM

No	Bentuk Kegiatan Pembelajaran	Rekognisi/ Penyetaraan	
		Mata Kuliah	Jmlh SKS
1	Pertukaran Pelajar	Sesuai dengan Mata Kuliah dan SKS yang diikuti.	-
2	Proyek Kemanusiaan	MK Pil. (1,2,3,4), MK Pil. Minat Skripsi, Kapita Selekta (1,2) = 14 sks. Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) = 4 sks. Total = 18 sks.	18
3	Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik		
4	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan		
7	Magang/Praktik Kerja	MK Pil. (1,2,3,4), MK Pil. Minat Skripsi, Kapita Selekta (1,2) = 14 sks. Kerja Praktek = 4 sks. Total = 18 sks.	18
5	Penelitian/Riset	MK Pil. (1,2,3,4), MK Pil. Minat Skripsi, Kapita Selekta (1,2) = 14 sks. Metodologi Penelitian = 2 sks. Total = 16 sks.	16
6	Studi/Proyek Independen		
8	Kegiatan Wirausaha	MK Pil. (1,2,3,4), MK Pil. Minat Skripsi, Kapita Selekta (1,2) = 14 sks. Kewirausahaan II = 2 sks. Total = 16 sks.	16

Untuk BKP no 2 sampai no 8 pada tabel 3, mahasiswa diharuskan memprogram KRS di SIM Akademik dengan mata kuliah Persiapan, Pelaksanaan, Laporan Akhir dan Aspek Kinerja BKP MBKM, jadi mata kuliah tersebut akan muncul di traskrip akademik seperti ditunjukkan pada tabel 4. Masing-masing mata kuliah BKP MBKM mempunyai indikator dan bobot penilaian yang berbeda-beda.

Tabel 4. Mata Kuliah Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM

No	Kode	Nama Mata Kuliah BKP MBKM	SKS
1	TSP500	Persiapan dan Perencanaan BKP MBKM-R18	4
2	TSP600	Persiapan dan Perencanaan BKP MBKM-R16	2
3	TSP700	Pelaksanaan dan Monitoring BKP MBKM	4
4	TSP800	Laporan Akhir, Presentasi dan Luaran BKP MBKM	4
5	TSP900	Aspek Kinerja BKP MBKM	6

Permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa yang memprogramkan MBKM yang mempunyai hak memprogramkan KRS sebanyak 24 SKS sedangkan pengakuan maksimal yang didapat sebanyak 18 SKS, maka ada 6 SKS yang harus ditempuh untuk diikuti perkuliaannya. Jika program MBKM berada di luar kota maka mahasiswa akan kesulitan untuk mengikuti perkuliahan 6 SKS yang tersisa, kecuali perkuliaannya dilaksanakan secara online.

Mata kuliah yang tersisa apabila mhs mengikuti MBKM pada semester V sebanyak 45 SKS dengan rincian 37 SKS mata kuliah inti dan 8 mata kuliah lokal, apabila diprogramkan pada semester VI matakuliah yang tersisa sebanyak 30 SKS dengan rincian 22 SKS mata kuliah inti dan 8 SKS mata kuliah lokal. Apabila mahasiswa memperpanjang atau mengikuti

lagi program MBKM pada semester berikutnya maka akan kesulitan untuk melakukan rekognisi yang akan menghilangkan 12 SKS mata kuliah inti. Padahal mata kuliah inti prodi Teknik Sipil yang berada pada semester VI dan VII adalah mata kuliah keahlian, menjadi riskan apabila disetarakan untuk kegiatan MBKM selain BKP magang. Untuk BKP magang saja, apabila tema magang yang diambil tidak sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan tidak semua dosen bersedia memberikan kesetaraan, misalnya magang pada proyek keairan sedangkan saat itu mahasiswa sedang mengambil mata kuliah perancangan Gedung dan perancangan jembatan. Rekognisi bisa dilakukan dengan jumlah SKS antara 8 – 12 SKS. Logika dari pelaksanaan MBKM adalah rekognisi sebanyak 60 SKS (hak mahasiswa mengikuti MBKM sebanyak 3 semester) adalah diambil dari 40 % dari total minimal sesuai ketentuan DIKTI sebanyak 144 SKS, tanpa mengganggu mata kuliah inti setiap prodi yang berkisar 80 SKS.

KESIMPULAN

Prodi Teknik Sipil Universitas Widyagama Malang dalam melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka telah melakukan peninjauan dan pengembangan kurikulum yang telah disesuaikan dengan pelaksanaan MBKM. Rekognisi untuk pertukaran pelajar baik dilaksanakan di dalam maupun di luar Universitas Widyagama dilakukan dengan bentuk terstruktur (structured form) diakui sesuai mata kuliah yang diambil, sedangkan rekognisi 7 bentuk kegiatan pembelajaran selain pertukaran pelajar dilakukan dengan bentuk bebas (free form) yang dinyatakan dalam kegiatan hard skill dan soft skill. Kendala dalam pelaksanaan rekognisi apabila mahasiswa mengambil 7 bentuk kegiatan pembelajaran selain pertukaran pelajaran sebanyak 2 semester hanya bisa disetarakan antara 8 – 12 SKS.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah penulisan artikel ini dapat diselesaikan, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian Dan Purwarupa PTS tahun anggaran 2021 Sekretariat Dirjen Dikti Ristek dan Universitas Widyagama yang telah memberikan ijin dan dukungan kegiatan ini. Rektor Universitas Widyagama Malang beserta Wakilnya. Ketua LPPM Universitas Widyagama Malang. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Widyagama Malang. Rekan sejawat khususnya panitia penerima hibah MBKM dan Dosen Prodi Teknik Sipil.

REFERENSI

- [1] Arifin, S., & Muslim, M. O. H. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1).
- [2] Fatmawati, E. (2020) Dukungan Perpustakaan dalam Implementasi “Kampus Merdeka Belajar”. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(2), 1076-1087.
- [3] Fitrah: *Journal of Islamic Education* P-ISSN : 2723-3847 Vol. 1 No. 1 Juni 2020 E-ISSN : 2723-388X Available online at <http://jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/fitrah> KONSEP KAMPUS MERDEKA BELAJAR DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
- [4] Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 141-157.
- [5] Hendrik, A. E. (2020). Implementasi Kebijakan Kemerdekaan Belajar dalam Proses Pembelajaran di Kampus IAKN KUPANG-NTT. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, Vol 4(2): 201-209.

- [6] Lhutfi, I. (2020). Merdeka Belajar Kampus Merdeka Policy: How Does It Affect the Sustainability on Accounting Education in Indonesia?. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, Vol 15 (2): 243-253.
- [7] Muslikh. (2020). Landasan Filosofi dan Analisis Terhadap Kebijakan MBKM. *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 1 (3): 40-46.
- [8] Priarmoko, S. (2020). Relevansi Kampus Merdeka Terhadap Kompetensi Guru Era 4.0 dalam Perspektif Experiential Learning Theory. *Jurnal At-Thullab* , Vol 4 (1): 1-15.
- Siregar, N. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Journal of Islamic Education*, Vol. 1(1): 141-157.
- [9] Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Jurnal Dedikasi Pendidikan, Vol. 5, No. 2, Januari 2021 : 603-614 <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/dedikasi> 614 ISSN 2548-8848 (Online) Kampus Merdeka dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Sikola*, Vol. 2 (3): 203-219.
- [10] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud.

